

STRATEGI PENINGKATAN PEMBANGUNAN FISIK OLEH PEMERINTAH DESA DI DESA KASTURI KECAMATAN CIKIJING KABUPATEN MAJALENGKA

Dini Herlianawati

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia
E-mail: herlianawatidini@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini permasalahan yang dapat dilihat dalam indikatornya yaitu : kurang optimalnya masyarakat dalam mengetahui akan apa saja yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. Selanjutnya kurang terbukanya informasi tentang penggunaan dana baik yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi. Selanjutnya kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi secara maksimal mengenai pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa di Desa Kasturi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Dalam penyusunan penelitian ini diperoleh data primer yaitu melalui metode wawancara langsung dengan para informan berjumlah 10 (sepuluh) orang diantaranya Kepala Desa 1 (satu) orang, Sekertaris Desa 1 (satu) orang, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 3 (tiga) orang, Masyarakat 5 (lima) orang. Selanjutnya data sekunder yaitu dilakukan dengan cara mencari data yang diperlukan seperti buku- buku, jurnal, dan literatur- literatur yang dibutuhkan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data reduction (reduksi data), display data, dan verifikasi data. Dari hasil penelitian dan pembahasan tentang Strategi Peningkatan Pembangunan Fisik di Desa Kasturi Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka sudah optimal, karena Pemerintah Desa dalam penyusunan perencanaan pembangunan fisik yang dilakukan dari tingkat yang paling bawah dulu, informasi kepada masyarakat dalam perencanaan pembangunan fisik, keterlibatan dengan masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan fisik yang juga ikut terlibat secara langsung, partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan fisik juga masyarakat selalu ikut berpartisipasi di dalamnya secara langsung, penggunaan dana desa dalam pembangunan fisik juga diketahui oleh masyarakat, kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengawasi pelaksanaan pembangunan fisik juga diketahui oleh masyarakat, masyarakat dalam memanfaatkan hasil- hasil pembangunan fisiknya juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Kata Kunci: Strategi, Peningkatan Pembangunan Fisik, Pemerintah Desa

PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa disebutkan bahwa pembangunan adalah suatu upaya dalam peningkatan kualitas hidup dan kehidupan yang sebesar-besarnya dalam kesejahteraan masyarakat desa. Selain itu, pembangunan ini juga harus mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, gotong royong guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Dengan lahirnya Undang-Undang tersebut maka desa tidak lagi merupakan level administrasi dan bawahan daerah, melainkan desa menjadi *independent community*, yang masyarakatnya berhak mengeluarkan aspirasi maupun gagasannya atas kepentingan sendiri dan orang lain. Desa yang selama ini diperankan sebagai piguran atau objek, sekarang berperan sebagai aktor.

Pembangunan adalah upaya untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan kata lain pembangunan ini merupakan proses pembangunan keseluruhan sistem penyelenggaraan untuk mewujudkan tujuan nasional, karena pembangunan merupakan pencerminan kehendak untuk terus meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat yang harus terus ditingkatkan secara berkelanjutan.

Pembangunan fisik merupakan wujud nyata dari pembangunan segi non fisik yang meliputi sosial budaya, sosial ekonomi, dan sebagainya. Pembangunan fisik merupakan suatu

usaha yang dilakukan oleh suatu Negara ataupun pemerintah dengan maksud dan tujuan untuk mengadakan kegiatan ke arah yang lebih baik lagi. Perubahan tersebut dapat dilihat secara konkrit dan nyata dengan kata lain perubahan tersebut identik dengan adanya sarana kantor desa, sarana pendidikan, sarana peribadatan, sarana pembuatan jalan, dan sarana- sarana umum lainnya.

Untuk mencapai suatu tujuan, strategi sangat diperlukan, selain memerlukan adanya keterlibatan dari masyarakat, suatu pembangunan juga membutuhkan strategi yang tepat. Pemilihan strategi dalam hal pembangunan ini penting karena akan menentukan dimana dan bagaimana suatu pemerintah dan seperti apa masyarakatnya. Sehingga dengan adanya kerja sama antara pemerintah desa dengan masyarakat maka pembangunan dapat berjalan secara optimal. Dalam rencana strategi yang dilakukan oleh pemerintah Desa Kasturi salah satunya adalah pembangunan jalan karena pembangunan jalan di Desa Kasturi masih kurangnya akses jalan yang menghubungkan antara satu tempat ketempat lain.

Berdasarkan hasil pengamatan awal yang dilakukan peneliti bahwa strategi Peningkatan pembangunan fisik oleh pemerintah desa di Desa Kasturi Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka belum optimal. Seperti ditunjukkan dari indikator-indikator sebagai berikut:

1. Masyarakatnya kurang begitu mengetahui akan apa saja yang

akan dilaksanakan oleh pemerintah desa. Contohnya masyarakat yang kurang mengetahui terkait apa saja rencana- rencana yang akan dilakukan oleh pemerintah Desa itu sendiri. Seperti tidak adanya baligo sebagai tanda atau informasi pembangunan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Desa.

2. Kurang terbukanya informasi tentang penggunaan dana baik yang berasal dari APBD (dana desa) ataupun APBD provinsi.
3. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi secara maksimal mengenai pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa di Desa Kasturi.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis ingin meneliti lebih dalam mengenai **“Strategi Peningkatan Pembangunan Fisik Oleh Pemerintah Desa Di Desa Kasturi Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka”**

KAJIAN PUSTAKA

Menurut Bracker (Afiff dan Abdullah 2010:71) menyatakan bahwa:

Strategi dapat didefinisikan sebagai keseluruhan aktivitas dimana suatu organisasi, baik secara kebetulan maupun perencanaan, berupaya mengembangkan sarana-sarannya, dan kemudian memanfaatkannya untuk menciptakan barang dan/jasa dengan tetap mempertimbangkan tujuan-tujuan berikut batasan-batasan yang digariskan para *stakeholder* organisasi, sehingga kehadirannya dapat dirasakan bermanfaat bagi para pelanggannya.

Menurut Maridikanto (Theresia,et.al,2014:6) mengungkapkan bahwa:

Pembangunan adalah upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana, dilaksanakan secara terus menerus oleh pemerintah bersama-sama segenap masyarakat dengan difasilitasi oleh pemerintah, dengan menggunakan teknologi yang terpilih, untuk memenuhi segala kebutuhan atau memecahkan masalah-masalah yang sedang dan akan dihadapi, demi tercapainya mutu hidup atau kesejahteraan seluruh warga masyarakat dari suatu bangsa yang merencanakan dan melaksanakan pembangunan tersebut.

Agar strategi pembangunan bisa berjalan dengan baik maka pemerintah Desa haruslah memperhatikan prinsip-prinsip berikut ini:

Prinsip-prinsip itu antara lain menurut Lestari (2015 : 10) yaitu:

1. Keterpaduan pembangunan desa, dimana kegiatan-kegiatan dilaksanakan memiliki sinergi dengan kegiatan pembangunan yang lain.
2. Partisipatif, dimana masyarakat terlibat secara aktif dalam kegiatan dan proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemanfaatan.
3. Keberpihakan, dimana orientasi kegiatan baik dalam proses maupun pemanfaatan hasil kepada seluruh masyarakat desa.
4. Otonomi dan desentralisasi, dimana masyarakat memperoleh kepercayaan dan kesempatan luas dalam kegiatan baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun pemanfaatan hasilnya.

Sedangkan Menurut Adisasmita (2015:117) menyatakan bahwa: “Pembangunan merupakan suatu proses dinamis untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada tingkat yang lebih tinggi dan serba sejahtera”.

METODE

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang dimaksudkan guna meneliti sejumlah data dan fakta yang diperoleh dari objek penelitian secara ilmiah, yakni penelitian yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan rasional dan empiris, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah (keilmuan). Adapun sumber data yang dipakai oleh peneliti untuk melengkapi data tersebut adalah informan dengan jumlah sebanyak 10 orang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Teknik pengelolaan/ analisis data dalam penelitian ini adalah *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data) dan *conclusion drawing/verification* (verifikasi data).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Keterpaduan pembangunan

a. Pemerintah Desa menyampaikan program pembangunan kepada seluruh elemen masyarakat

Dengan demikian, hasil wawancara dengan 5 orang informan diatas yaitu (Kepala Desa, Sekertaris Desa, BPD, beserta Masyarakat) terkait dengan bagaimana upaya Pemerintah

Desa dalam penyusunan perencanaan pembangunan fisik di Desa Kasturi Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka memberikan keterangan yang sesuai. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Riyadi dan Bratakusumah (2004: 6) mengemukakan bahwa: perencanaan pembangunan merupakan suatu tahapan awal proses pembangunan. Sebagai tahapan awal, maka perencanaan pembangunan merupakan pedoman/acuan/dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan. Karena itu hendaknya perencanaan pembangunan hendaknya bersipat implementatif (dapat melaksanakan) dan aplikatif (dapat diterapkan), serta perlu disusun dalam suatu perencanaan strategis dalam arti tidak terlalu mengatur, penting, mendesak dan mampu menyentuh kehidupan masyarakat luas, sekaligus mampu mengantisipasi tuntutan perubahan baik internal maupun eksternal, serta disusun berdasarkan fakta riil dilapangan.

Kemudian berdasarkan hasil observasi mengenai bagaimana upaya Pemerintah Desa dalam penyusunan perencanaan pembangunan fisik di Desa Kasturi Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka ini sudah optimal hal ini terbukti dengan penyusunan perencanaan pembangunan fisik di Desa Kasturi Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka ini sudah baik dan perlu ditingkatkan lagi agar lebih baik untuk masa yang akan datang.

b. Pemerintah Desa memberikan informasi secara jelas mengenai

program pembangunan yang dilaksanakan

Dengan demikian, hasil wawancara dengan 5 orang informan diatas yaitu (Kepala Desa, Sekertaris Desa, BPD, beserta Masyarakat) terkait dengan bagaimana upaya Pemerintah Desa dalam memberikan informasi kepada masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan fisik di Desa Kasturi Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka memberikan keterangan yang sesuai. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Riyadi dan Bratakusumah (2004: 6) mengemukakan bahwa: perencanaan pembangunan merupakan suatu tahapan awal proses pembangunan. Sebagai tahapan awal, maka perencanaan pembangunan merupakan pedoman/acuan/dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan. Karena itu hendaknya perencanaan pembangunan hendaknya bersipat implementatif (dapat melaksanakan) dan aplikatif (dapat diterapkan), serta perlu disusun dalam suatu perencanaan strategis dalam arti tidak terlalu mengatur, penting, mendesak dan mampu menyentuh kehidupan masyarakat luas, sekaligus mampu mengantisipasi tuntutan perubahan baik internal maupun eksternal, serta disusun berdasarkan fakta riil dilapangan.

Kemudian berdasarkan hasil observasi mengenai bagaimana upaya Pemerintah Desa dalam memberikan informasi kepada masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan fisik di Desa Kasturi Kecamatan

Cikijing Kabupaten Majalengka yaitu ketika menyampaikan informasi kepada masyarakat Pemerintah Desa beserta BPD selalu mengadakan rapat bersama masyarakat selain mengadakan rapat Pemerintah Desa juga dalam memberikan informasi kepada masyarakat yaitu melalui ceramah pada saat sebelum solat jumat.

c. Pemerintah Desa dapat melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan fisik

Dengan demikian, hasil wawancara dengan 5 orang informan diatas yaitu (Kepala Desa, Sekertaris Desa, BPD, beserta Masyarakat) terkait dengan upaya masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan fisik di Desa Kasturi Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka memberikan keterangan yang sesuai. Hal ini sesuai yang dikemukakan oleh Riyadi dan Bratakusumah (2004: 6) mengemukakan bahwa : perencanaan pembangunan merupakan suatu tahapan awal proses pembangunan. Sebagai tahapan awal, maka perencanaan pembangunan merupakan pedoman/acuan/dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan. Karena itu hendaknya perencanaan pembangunan hendaknya bersipat implementatif (dapat melaksanakan) dan aplikatif (dapat diterapkan), serta perlu disusun dalam suatu perencanaan strategis dalam arti tidak terlalu mengatur, penting, mendesak dan mampu menyentuh kehidupan masyarakat luas, sekaligus mampu mengantisipasi tuntutan perubahan baik internal

maupun eksternal, serta disusun berdasarkan fakta riil dilapangan.

Kemudian berdasarkan hasil observasi mengenai bagaimana upaya masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan fisik di Desa Kasturi Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka ini sudah cukup baik karena Pemerintah Desa dan BPD selalu bersama-sama terlibat dalam penyusunan perencanaan pembangunannya dan selalu mengajak masyarakat untuk ikut terlibat didalamnya agar penyusunan perencanaan pembangunan fisik ini dapat berjalan dengan baik.

2. Partisipatif

a. Pemerintah Desa dan Masyarakat ikut berpartisipasi dalam pembangunan fisik

Dengan demikian, hasil wawancara dengan 10 orang informan diatas yaitu (Kepala Desa, Sekertaris Desa, BPD, beserta Masyarakat) terkait dengan bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan dalam partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Kasturi Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka memberikan keterangan yang sama. Hal ini sesuai dengan yang di kemukakan oleh Sastropeotro (1998: 13) mengemukakan bahwa: partisipasi adalah keterlibatan mental atau pikiran dan perasaan seseorang didalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan tertentu serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan. Partisipasi ini juga menjadikan

masyarakat tidak hanya dianggap sebagai objek pembangunan semata, tetapi juga sebagai subyek dalam pembangunan. Pembangunan yang berorientasi pada masyarakat berarti hasil pembangunan yang akan dicapai akan bermanfaat dan berguna bagi masyarakat.

Kemudian berdasarkan hasil observasi mengenai bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan masyarakat dalam partisipasi pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Kasturi Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka ini sudah optimal karena untuk mengatasi hambatan tersebut maka upaya yang dilakukan yaitu lebih kepada melakukan sosialisasi-sosialisasi dengan cara memberikan pemahaman- pemahaman kepada masyarakat baik itu oleh pemerintah desa, BPD ataupun oleh unsur tokoh masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

b. Pemerintah desa dan masyarakat ikut serta bertanggung jawab akan adanya pembangunan fisik

Dengan demikian, hasil wawancara dengan 5 orang informan diatas yaitu (Kepala Desa, Sekertaris Desa, BPD, beserta Masyarakat) terkait dengan bagaimana upaya dalam mengatasi hambatan dalam penggunaan dana desa terhadap pembangunan fisik di Desa Kasturi Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka memberikan keterangan yang sesuai. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Sastropeotro (1998: 13) mengemukakan bahwa: partisipasi adalah keterlibatan

mental atau pikiran dan perasaan seseorang didalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan tertentu serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan. Partisipasi ini juga menjadikan masyarakat tidak hanya dianggap sebagai objek pembangunan semata, tetapi juga sebagai subyek dalam pembangunan. Pembangunan yang berorientasi pada masyarakat berarti hasil pembangunan yang akan dicapai akan bermanfaat dan berguna bagi masyarakat.

Kemudian berdasarkan hasil observasi mengenai bagaimana upaya dalam mengatasi hambatan dalam penggunaan dana desa dalam pembangunan fisik di Desa Kasturi Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka ini sudah optimal terbukti dengan Pemerintah Desa bersama BPD dan tokoh masyarakat itu selalu giat melakukan sosialisasi- sosialisasi kepada masyarakat terhadap penggunaan dana desanya juga tidak lupa selain melakukan sosialisasi- sosialisasi kepada masyarakat Pemerintah Desa juga tidak lupa memasang baligo atau benner di depan kantor Pemerintah Desa agar masyarakat bisa melihat dan mengetahuinya.

3. Keberpihakan

a. Adanya keberpihakan Pemerintah Desa kepada Masyarakat akan meningkatkan pembangunan fisik

Dengan demikian, hasil wawancara dengan 10 orang informan diatas yaitu (Kepala Desa, Sekertaris

Desa, BPD beserta Masyarakat) terkait dengan bagaimana upaya BPD dalam mengawasi pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Kasturi Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka memberikan keterangan yang sesuai. Yaitu ketika BPD mengawasi pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Kasturi Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka BPD selalu ikut mengawasi pelaksanaan pembangunan fisik ini di hari- hari libur beliau serta BPD juga selalu bersinergis dengan Pemerintah Desa dan tokoh masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Kasturi Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka.

Berdasarkan hasil observasi mengenai upaya BPD dalam mengawasi pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Kasturi Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka ini belum optimal. Karena BPD tidak selalu rutin melaksanakan tugasnya sebagai pengawas atau sebagai control dalam pelaksanaan pembangunan fisik tersebut akan tetapi BPD selalu berusaha untuk menjalankan dan melaksanakan tupoksinya sebagai BPD meskipun BPD sejatinya lebih banyak melakukan aktivitasnya diluar sebagai BPD tersebut.

b. Keterlibatan masyarakat dan pemerintah desa dalam proses pembangunan fisik guna untuk meningkatkan kesejahteraan sosial

Dengan demikian, hasil wawancara dengan 5 orang informan diatas yaitu (Kepala Desa, Sekertaris Desa, BPD, beserta masyarakat) terkait dengan bagaimana upaya untuk

mengatasi hambatan masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Kasturi Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka memberikan keterangan yang sesuai. Dimana dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan fisiknya peran masyarakat memang harus lebih ditingkatkan lagi dalam pengawasannya.

Kemudian dari hasil observasi mengenai upaya untuk mengatasi hambatan masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Kasturi Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka yaitu peran masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan fisiknya Pemerintah Desa beserta masyarakat harus saling bersinergis dan bersama-sama dalam mengawasi jalannya suatu pembangunan agar pengawasannya menjadi lebih baik dan lebih optimal lagi untuk masa yang akan datang.

4. Otonomi dan Desentralisasi

a. Pemerintah desa dan masyarakat memiliki pengawasan terhadap jalannya suatu pembangunan fisik

Dengan demikian, hasil wawancara dengan 5 orang informan diatas yaitu (Kepala Desa, Sekertaris Desa, BPD, beserta masyarakat) terkait dengan bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Kasturi Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka memberikan keterangan yang sesuai. Dimana dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan fisiknya peran masyarakat memang harus lebih

ditingkatkan lagi dalam pengawasannya.

Kemudian dari hasil observasi mengenai upaya untuk mengatasi hambatan masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Kasturi Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka yaitu peran masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan fisiknya Pemerintah Desa beserta masyarakat harus saling bersinergis dan bersama-sama dalam mengawasi jalannya suatu pembangunan agar pengawasannya menjadi lebih baik dan lebih optimal lagi untuk masa yang akan datang.

b. Pemerintah desa dan masyarakat memiliki wewenang untuk memanfaatkan hasil pembangunan fisik itu sendiri

Dengan demikian, hasil wawancara dengan 10 orang informan diatas yaitu (Kepala Desa, Sekertaris Desa, BPD, beserta Masyarakat) terkait dengan bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan masyarakat dalam memanfaatkan hasil- hasil pembangunan fisik di Desa Kasturi Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka ini adalah upayanya dengan cara merawat hasil- hasil pembangunan bersama dengan masyarakat yaitu dengan cara penanggulangan sampah dan melakukan pengawasan serta mengajak masyarakat untuk sama- sama merasakan hasil dari pembangunan itu sendiri.

Berdasarkan hasil observasi mengenai bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan masyarakat dalam memanfaatkan hasil- hasil

pembangunan fisik di Desa Kasturi Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka yaitu pemerintah desa dan masyarakat bersama-sama untuk menjaga, mengawasi dan merawat hasil pembangunan yang ada khususnya di Desa Kasturi sendiri serta selalu mendorong masyarakat yang belum merasakan hasil dari pembangunannya untuk bersama-sama merasakan dan memanfaatkan hasil pembangunan yang ada.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Strategi Peningkatan Pembangunan Fisik oleh Pemerintah Desa di Desa Kasturi Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka sudah dikatakan optimal yaitu cara Pemerintah Desa dalam penyusunan perencanaan pembangunan fisik yang dilakukan dari tingkat yang paling bawah dulu, informasi kepada masyarakat dalam perencanaan pembangunan fisik, keterlibatan dengan masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan fisik yang juga ikut terlibat secara langsung, partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan fisik juga masyarakat selalu ikut berpartisipasi di dalamnya secara langsung, penggunaan dana desa dalam pembangunan fisik juga diketahui oleh masyarakat, kinerja BPD dalam mengawasi pelaksanaan pembangunan fisik juga diketahui oleh masyarakat, masyarakat dalam memanfaatkan hasil-hasil

pembangunan fisiknya juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Adapun hambatannya yaitu dalam penyusunan perencanaan pembangunan fisik aspirasi dari masyarakatnya masih kurang, informasi yang diberikan Pemerintah Desa kepada masyarakat masih kurang optimal, masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan fisiknya masih belum optimal karena dalam penyusunan perencanaannya masih ada masyarakat yang belum terlibat dalam penyusunan perencanaan pembangunan fisiknya, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan fisiknya masih ada yang cuek, penggunaan dana desa terhadap pembangunan fisik juga belum optimal karena hanya sebagian masyarakat yang benar-benar mengetahui penggunaan dana desa tersebut, BPD dalam mengawasi pelaksanaan pembangunan fisik juga belum optimal karena hampir semua BPD mempunyai kesibukannya masing-masing sehingga BPD tidak bisa selalu mengawasi pelaksanaan pembangunan fisiknya, pengawasan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan fisiknya juga belum optimal karena masyarakat masih ada yang cuek dan partisipasinya masih kurang optimal, masyarakat dalam memanfaatkan hasil-hasil pembangunannya masih ada masyarakat yang belum merasakan dari adanya pemanfaatan tersebut karena bisa dari masyarakat yang tempatnya jauh dari tempat pembangunan tersebut. Serta upayanya yaitu penyusunan perencanaannya perlu ditingkatkan lagi

agar lebih baik untuk masa yang akan datang, Pemerintah Desa dalam memberikan informasi kepada masyarakat selalu mengadakan rapat bersama BPD, dalam penyusunan perencanaan pembangunan Pemerintah Desa serta BPD bersama masyarakat selalu bersama-sama terlibat dalam penyusunan perencanaan pembangunan fisik agar dapat berjalan dengan baik, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan fisik yaitu dengan cara melakukan sosialisasi-sosialisasi kepada masyarakat, dalam penggunaan dana desa dalam pembangunan fisik Pemerintah Desa beserta BPD selalu giat melakukan sosialisasi kepada masyarakat serta Pemerintah Desa juga tidak lupa untuk memasang baligo di depan kantor Pemerintah Desa, upaya BPD dalam mengawasi pelaksanaan pembangunan fisik BPD selalu ikut mengawasi pelaksanaan pembangunan fisiknya di hari-hari libur beliau, upaya dalam peran masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan fisik Pemerintah Desa serta masyarakat harus saling bersinergis dan bersama-sama dalam mengawasi pelaksanaan pembangunan fisiknya agar lebih baik dan lebih optimal di masa yang akan datang, dalam memanfaatkan hasil-hasil pembangunan fisik Pemerintah Desa dan Masyarakat bersama-sama untuk menjaga, mengawasi dan merawat hasil pembangunannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. (2010). *Komunikasi Organisasi dalam Perspektif Teori dan Praktek*. Malang : UMM Press.
- Adisasmita, Rahardjo. (2015). *“Pembangunan Wilayah”*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Bratakusumah .(2004). *“Perencanaan Pembangunan Daerah”*,PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Lestari, Devi, (2015). *Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan Nagori Dolok Hataran Kecamatan Siantar Kabupatem Simalungun*, Skripsi, Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Sastropetro, RA Santoso. (1998). *Partisipasi Komunikasi, Persuasi, dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*. Alumni Bandung.
- Theresia dkk, (2014). *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, Bandung, Alfabeta
- Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa